



BPK Ungkap Penyimpangan Penggunaan BOS Rp 71,7 M

DANA BOS TAHUN 2015 BUAT SISWA DI KARANGASEM

NO	LEVEL	PERUNTUKAN	SEKOLAH	NILAI
1	SD	47.244 Siswa	358 Unit SD	Rp 37,795 Miliar
2	SMP	18.202 Siswa	50 Unit SMP	Rp 18,200 Miliar
4	SMA	7.991 Siswa	20 Unit SMA	Rp 9,589 Miliar
5	SMK	4.211 Siswa	10 Unit SMK	Rp 6,160 Miliar
TOTAL				Rp 71,744 Miliar

KENAIKAN BESARAN DANA BOS DI WILAYAH KARANGASEM

NO	LEVEL	BESARAN DANA BOS	
		TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	SD	Rp 580.000 Per Siswa	Rp 800.000 Per Siswa
2	SMP	Rp 710.000 Per Siswa	Rp 1.000.000 Per Siswa
3	SMA	Rp 1.000.000 Per Siswa	Rp 1.200.000 Per Siswa
4	SMK	Rp 1.200.000 Per Siswa	Rp 1.500.000 Per Siswa

AMLAPURA, NusaBali

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap terjadinya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 di Kabupaten Karangasem senilai Rp 71,74 miliar. Penyimpangan itu lebih diakibatkan kesalahan administrasi, karena dana BOS yang seharusnya masuk APBD lebih dulu, justru langsung digel-

ontorkan ke rekening sekolah.

Adanya dugaan penyimpangan dana BOS senilai Rp 71,74 miliar tahun 2015 ini diungkapkan langsung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta, dan Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 1



Sembungan - -

BPK Ungkap Penyimpangan Penggunaan BOS Rp 71,7 M



Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Karangasem I Gede Adnya Mulyadi

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Karangasem I Gusti Bagus Budiadnyana di Amlapura, Senin (1/6) lalu.

Terungkap, dana BOS tahun 2015 di Karangasem tersebut diterima para siswa level SD sebesar Rp 37,795 miliar, level SMP sebesar Rp 18,200 miliar, level SMA sebesar Rp 9,589 miliar, dan kategori SMK sebesar Rp 6,16 miliar. Rinciannya, peruntukan bagi 47.244 siswa SD dari 358 sekolah, 18.202 siswa SMP dari 50 sekolah, 7.991 siswa SMA dari 20 sekolah, dan 4.211 siswa SMK dari 10 sekolah yang ada di Karangasem.

Menurut Sekkab Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, alokasi dana BOS untuk siswa tahun 2015 mengalami kenaikan di bandingkan 2014. Untuk siswa kelompok SD, nominal dana BOS naik dari semula Rp 580.000 menjadi Rp 800.000 per orang. Sedangkan untuk siswa SMP, dana BOS tahun ini naik dari semula Rp 710.000 menjadi Rp 1 juta per orang. Sementara untuk siswa SMA, dana BOS naik dari semula Rp 1 juta menjadi Rp 1,2 juta per orang. Sebaliknya, untuk siswa

SMK, dana BOS naik dari semula Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,5 juta per orang.

Namun, dalam penggunaannya, kata Adnya Mulyadi, justru menjadi temuan BPK. Masalahnya, dana BOS ini langsung digelontor ke rekening masing-masing sekolah. "Padahal, seharusnya masuk dulu ke APBD Karangasem," ungkap Adnya Mulyadi. Jadi, penyimpangan ini hanya masalah administrasi, bukan korupsi.

Adnya Mulyadi menyebutkan, segenap pejabat eksekutif di lingkup Pemkab Karangasem pusing memikirkan penggunaan dana BOS tahun 2016 mendatang, agar tidak lagi terjadi penyimpangan. Masalahnya saat ini, justru belum turun petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS.

Yang jelas, kata Adnya Mulyadi, untuk alokasi dana BOS tahun 2016 mendatang terlebih dulu harus masuk melalui APBD. "Sulit juga, nantinya dana BOS mesti masuk APBD dulu. Setelah itu, baru dialokasikan (ke sekolah-sekolah, Red). Kekhawatiran kita, nanti realisasi dana BOS bisa terlambat. Padahal, sampai sekarang belum ada petunjuk

teknis sebagai pedoman pelaksanaan," keluhnya.

Ditegaskan Adnya Mulyadi, dana BOS harus masuk APBD terlebih dulu sebelum dialokasikan ke sekolah-sekolah, agar penggunaannya terkontrol. "Dana BOS nantinya mesti masuk APBD dulu, karena penggunaan BOS sebelumnya yang masuk langsung ke rekening sekolah, justru jadi temuan BPK," tandas Adnya Mulyadi.

Paparan senada juga disampaikan Kepala Bappeda Karangasem, Ketut Sedana Merta. Dia menyebutkan dana BOS terlebih dulu harus masuk APBD. "Sisi baik kalau dana BOS masuk APBD adalah penggunaannya bisa terkontrol. Tapi, proses pencairannya bisa terlambat, karena prosedurnya lebih ruwet," jelas Sedana Merta kepada NusaBali.

Dana BOS itu sendiri, kata Sedana Merta, penggunaannya bisa untuk belanja modal, seperti mendanai bangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, gaji pegawai, dan membiayai siswa. Nah, jika pencairannya terlambat, maka jadi masalah tersendiri bagi sekolah.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Karangasem, I Gusti Bagus Budiadnyana, mengaku sampai saat ini belum ditemukan formula yang tepat mengatasi penggunaan dana BOS agar lebih efektif, lancar, dan tidak terhambat pencairannya. "Saya juga pusing mengenai penggunaan dana BOS untuk tahun 2016 depan. Sebab, teknis penggunaan dana BOS tahun sebelumnya menjadi temuan BPK," sebut Budiadnyana.

Masalahnya lagi, kata Budiadnyana, sampai sekarang belum ada petunjuk teknis untuk penggunaan dana BOS sebagai pegangan. "Sedangkan petunjuk teknis yang ada sesuai Permen-dikbud Nomor 101 Tahun 2013 adalah untuk penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun 2014," bebernya. **k16**

• NUSABALIANTRIA



Dua Polhut Tersangka Illegal Logging

★ BKSDA Minta Penangguhan Penahanan

Polisi telah meningkatkan status dua oknum BKSDA ini menjadi tersangka. Karena saat dilakukan penangkapan mereka tidak dapat menunjukkan surat tugas dan perlengkapan administrasi lainnya.

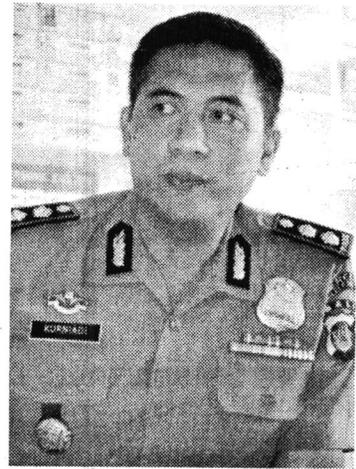
SINGARAJA, NusaBali

Meski pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bali menyangkal dua petugasnya terlibat dalam kasus ilegal logging atau pembalakan liar, tak membuat surut langkah jajaran Pplres Buleleng. Polisi bahkan telah menetapkan tiga tersangka pelaku pencurian kayu

di hutan lindung Tamblingan di Desa Munduk, Kecamatan Banjar Buleleng.. Termasuk dua tersangka yang merupakan petugas polisi kehutanan (Polhut) BKSDA, dengan inisial MS dan MRS.

Pihak BKSDA yang sebelumnya sempat menyangkal pun kini pilih mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian. "Dari pihak BKSDA kemarin meminta penangguhan penahanan dua orang oknumnya yang terlibat dalam kasus pencurian kayu di hutan lindung Tamblingan. Tetapi meskipun nanti ada penangguhan penahanan, mereka tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Kapolres Buleleng, AKBP Kurniadi, saat dikonfirmasi Selasa (2/6).

Ia mengatakan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian telah meningkatkan status pelaku menjadi tersangka. Karena saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan surat tugas dan perlengkapan administrasi lainnya. Meski sampai saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.



AKBP Kurniadi

Polisi juga masih menunggu dua tim ahli, yakni dari pihak Dinas Kehutanan dan BKSDA, dalam pemeriksaan kelengkapan berkas. Dari hasil pemeriksaan tim ahli, nantinya akan ditetapkan bersalah atau tidaknya, oleh pihak pengadilan. "Saat ini kami masih menunggu pemeriksaan dua tim ahli yang nantinya akan menentu-

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 4



Sambungan - -

kan bersalah atau tidaknya kedua oknum ini. Nanti keputusannya akan diputuskan oleh pengadilan, tetapi penangkapan kedua tersangka sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuh dia.

Termasuk juga penetapan hukuman terhadap sopir truk engkel yang berinisial KMD, yang saat itu terlibat dalam kasus tersebut. Mereka yang saat itu tertangkap tangan sedang mengangkut 2,5 kubik kayu dari hutan lindung Tamblingan, dikenakan UU nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan hutan dan UU Nomor 50 tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi.

Sebelumnya, Kepala BKSDA Bali, Istanto, Jumat (29/5) dalam keterangan persnya membantah penangkapan dua oknum polisi hutan yang dinyatakan terlibat dalam pencurian kayu, di hutan lindung Tamblingan, Rabu (27/5) malam. Menurut BKSDA tindakan penangkapan dua oknum polisi hutan tersebut oleh pihak kepolisian

dinilai sangat berlebihan, karena saat itu keduanya disebut tengah melaksanakan tugas pengamanan barang bukti pencurian kayu di hutan lindung Tamblingan.

Menurutnya kedua oknum petugas tersebut telah mengantongi Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Balai KSDA Bali. Dengan Nomor PT.109/BKSDA.BL-1/LIN/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2015.

Selain itu juga ditunjukkan Laporan Kejadian Nomor LK.05/BKSDA.BL-2/R.BKH/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Berita Acara Temuan Barang Bukti Nomor BA.12/BKSDA.BL-1/LIN/2015 tanggal 23 Maret 2015. "Apabila ada statement dari pihak Polres Buleleng yang menyatakan bahwa kayu tersebut akan dibawa ke mess untuk kemudian dijual adalah statement yang prematur, mengada-ada, tidak sesuai akal sehat dan tidak didukung dengan fakta-fakta dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan maupun saksi-saksi," ujarnya. **k23**

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 4



Dugaan Penyimpangan PHR Badung Belasan Saksi Diperiksa, Kasus Belum Naik Kelas

DENPASAR, NusaBali

Meski belasan saksi sudah diperiksa dalam kasus dugaan penyimpangan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) Pemkab Badung yang dibagikan ke kabupaten/kota se-Bali, namun hingga saat ini penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali belum juga menaikkan status kasus ini. Hasil pemeriksaan sementara, penyimpangan diduga berada di enam kabupaten yang menerima pembagian PHR ini.

Informasi yang dihimpun, dari hasil pemeriksaan saksi dari enam kabupaten penerima pembagian PHR dan dua penyumbang PHR, yaitu Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar, ditemukan beberapa penyimpangan. Di antaranya, peruntukan pembagian PHR ke enam kabupaten yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. "Harusnya dipakai untuk membangun akomodasi pariwisata di daerah tersebut Tapi digunakan untuk

hal lainnya," ujar sumber di Kejati Bali pada, Senin (1/6).

Hingga saat ini, sudah ada belasan saksi dari enam kabupaten penerima pembagian PHR Badung yang diperiksa. Selain itu, beberapa saksi dari Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar sebagai penyumbang PHR serta Pemprov Bali sebagai pihak yang membagikan PHR juga telah diperiksa.

Sementara, dua saksi yang diperiksa terakhir oleh penyidik Kejati Bali, yaitu Kabag Akuntansi dan Pelaporan Pemprov Bali, Dewa Tagel Wirasa dan Kasubag Fasilitas Evaluasi dan Transfer Pemprov Bali, Wayan Subagia. "Dua saksi tersebut sudah kami periksa," jelas salah satu penyidik Kejati, Made Tangkas.

Kasus ini berawal dari kicauan anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana yang mengatakan ada penyimpangan dalam pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten

Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali. Ia mengatakan pembagian PHR di Badung tidak sesuai dengan peruntukan. Pasalnya, PHR yang seharusnya digunakan untuk mendukung pariwisata justru digunakan untuk kepentingan lain. Ia mengatakan pembagian di luar peruntukan ini jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar Perda, bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata.

Sementara mengenai jumlah nominal pembagian dana yang didapat dari PHR Badung tersebut, masih didalami. Karena ada dugaan sesesih dalam pelaporan dalam pertanggungjawaban di APBD Badung tahun 2014. Menurutnya, besaran nominal yang disebutkan dibagi sekitar Rp 260 miliar lebih. Ada dugaan selisih mencapai Rp 41 miliar. Nilai nominal inilah akan didalami karena diduga ada penyelewengan. rez

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 5



Gubernur Wacanakan Panel Surya di Kantor

Panel surya akan dimulai di perkantoran Pemprov Bali. Gubernur juga berencana menggunakan kendaraan dinas bertenaga listrik.

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mewacanakan untuk memulai penggunaan 'solar cell' atau panel surya yang ramah lingkungan pada gedung-gedung perkantoran milik Pemprov Bali.

"Nantinya akan dimulai dari lingkungan Kantor Gubernur Bali,"

kata Pastika saat menerima audiensi rombongan PLN Distribusi Bali, di Denpasar, Senin (1/6).

Tidak terbatas hanya gedung perkantoran, Pastika juga berencana menggunakan kendaraan dinas bertenaga listrik.

Menurut dia, listrik yang

dihasilkan 'solar cell' pada siang hari bisa dimanfaatkan untuk mengisi daya untuk kendaraan dinas, sehingga bisa menghemat penggunaan BBM.

"Rencana tersebut merupakan program terintegrasi antara energi terbarukan, transportasi, dan lingkungan hidup yang bisa mendukung program Bali Clean and Green (bersih dan hijau)," ujarnya.

General Manager PLN Distribusi Bali Doddy Pangaribuan menyambut baik rencana pemanfaatan 'solar cell' untuk

mendukung pasokan listrik yang berasal dari PLN.

Pada kesempatan itu, ia juga mengemukakan bahwa pasokan listrik di Bali memadai semenjak dibangunnya pembangkit listrik Celukan Bawang yang bisa memasok 380 Megawatt dan 30 persennya dijadikan cadangan.

Pangaribuan mengemukakan bahwa pertumbuhan pemakaian listrik di Bali mencapai 5 persen pada triwulan I/2015 dari target 13 persen. Pertumbuhan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang hanya

mencapai 1,6 persen.

Ke depannya, dia berharap Bali bisa lepas dari ketergantungan listrik pasokan Jawa dengan melaksanakan beberapa rencana, di antaranya konversi mesin pembangkit tenaga listrik di Pesanggaran dan Pamaron yang awalnya berbahan diesel menjadi gas, serta membangun pembangkit listrik baru di Karangasem yang bisa memasok 200-300 Megawatt.

Untuk itu, Pangaribuan sangat mengharapkan adanya dukungan dan sinergi PLN dengan pihak Pemprov Bali. **ant**

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 2



JKBM dan BPJS Digabung



dr Ketut Suarjaya

DENPASAR,
NusaBali

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali menargetkan 70 persen masyarakat Bali menjadi anggota Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) secara mandiri sampai akhir 2017, sebab Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) akan ber-

akhir tahun 2016 dan diintegrasikan (digabung) dengan BPJS. Nantinya, anggaran JKBM dapat dipergunakan untuk perbaikan serta peningkatan fasilitas kesehatan, promosi kesehatan, dan mutu pelayanan kesehatan. Namun, Dinkes akan memprioritaskan pengembangan fasilitas kesehatan (faskes).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya, beberapa waktu lalu. Menurut dia, dari anggaran JKBM tersebut, pihaknya akan memprioritaskan penambahan tempat tidur kelas III untuk di beberapa rumah sakit daerah. Yang menjadi prioritas antara lain rumah sakit Jembrana, Buleleng, Klungkung, Bangli, dan Karangasem.

"Kami juga menargetkan, pada tahun 2016 nanti semua rumah sakit daerah kelas B, terutama yang kami prioritaskan antara lain RSUD Jembrana, Klungkung, dan Karangasem. Nantinya, rumah sakit daerah milik pemerintah akan dapat menampung pasien rumah sakit swasta di daerah masing-masing," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat RS rujukan regional seperti RSUD Sanjiwani, Gianyar dan Tabanan, serta pada tahun ini, rencananya akan ada pembangunan rumah sakit pratama di Nusa Penida, Klungkung dan Buleleng.

Sementara itu, untuk faskes seperti puskesmas, pihaknya memberikan perhatian lebih dengan berjanji akan mengunjungi 36 puskesmas di Bali secara bertahap dalam setahun, ditambah dengan pemberian pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM.

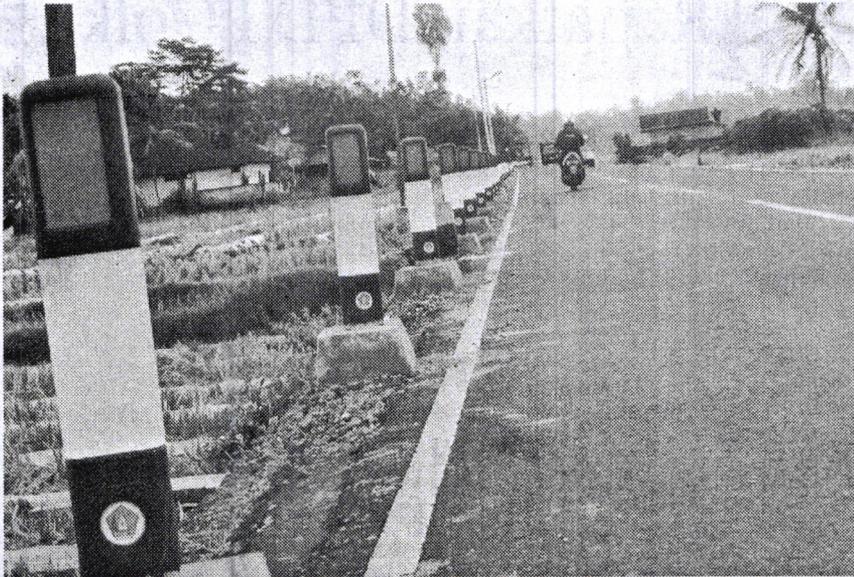
"Puskesmas sesungguhnya sebagai upaya kesehatan masyarakat yang paling awal, sehingga penting untuk diberikan pembinaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas SDM. Di samping itu, akreditasi puskesmas juga bisa dimulai sehingga bisa menjadi tolok ukur mutu pelayanannya," tandasnya. cr56

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 3



Kendaraan Rawan Tergelincir, Dishubkominfo Pasang Delineator



• NUSABALI/ARI SISWANTO

PATOK pengaman jalan (delineator) yang dipasang di jalan Penarungan-Lukluk oleh Dishubkominfo Badung.

MANGUPURA, NusaBali

Pemasangan delineator atau patok pengaman jalan di ruas jalan Desa Penarungan sampai Kelurahan Lukluk dinilai sangat berguna, sebab di kanan dan kiri jalan sangat minim pembatas, semisal trotoar. Namun juga sangat disayangkan, karena patok pengaman jalan hanya dipasang di satu sisi.

"Yang sisi satunya ini *kok nggak* dipasang juga. *Kan* bahaya juga itu, apalagi kalau malam hari," kata salah seorang pengguna jalan, Selasa (2/6).

Ia berharap pemerintah membangun patok pengaman jalan pada dua sisi jalan, sehingga pengguna jalan merasa aman ketika melintas. Pemerintah perlu juga memikirkan membangun trotoar di ruas jalan tersebut, mengingat hampir tidak ada celah aman bagi pejalan kaki.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Badung I Wayan Weda Dharmaja, menegaskan pemasangan patok pengaman jalan sudah atas kajian matang. Kalau pun tahun ini baru satu sisi saja yang dipasang, Weda berjanji akan mengupayakan secara bertahap patok pengaman jalan bisa dibangun di sisi sebaliknya.

"Tahun ini memang hanya satu sisi. Kami akan kaji lagi apakah perlu sisi lainnya dipasang. Kami akan analisa dulu, sebab jalan di sana memang sempit," kata pejabat asal Sembung, Mengwi, itu.

Weda menambahkan, pemasangan patok pengaman jalan tidak saja di ruas jalan Penarungan-Lukluk, tetapi juga di beberapa tempat Sayangnya,

ia tak merinci titik mana saja yang sudah dipasang patok pengaman jalan.

Untuk anggaran, mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung, ini menyebut di bawah Rp 200 juta. Tapi persisnya berapa, dia mengaku tak hafal "Yang pasti anggarannya tidak sampai Rp 200 juta," tegasnya.

Selain pembangunan delineator atau patok pengaman jalan, Dishubkominfo Badung, juga menganggarkan pemasangan pagar pengaman jalan (guard rail). Terutama di kawasan Badung Utara yang topografinya berbukit. Salah satunya jalur menuju kawasan Pura Pucak Tedung, Petang, yang di kanan dan kiri jalan diapit jurang dan minim pengaman.

"Iya di kawasan menuju Pura Pucak Tedung itu di kanan dan kirinya itu *kan* jurang. Makanya tahun ini kami sudah menganggarkan untuk memasang guard rail," kata dia.

Minimnya pagar pengaman jalan ini tidak saja di kawasan Badung Utara, di Badung Selatan pun demikian. Akan tetapi, pejabat asal Sembung itu menambahkan, untuk wilayah Badung Selatan secara bertahap sudah dipasang pagar pengaman jalan sejak tahun lalu. "Kami memang melakukan bertahap, untuk tahun 2015 kami fokuskan di Badung Utara. Sementara di Badung Selatan sudah dilakukan tahun kemarin seperti jalan menuju kawasan Pura Goa Gong, Jimbaran, sudah kami pasang," jelasnya.

Dikatakannya, tahun anggaran 2015 Dishubkominfo telah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 3 miliar untuk pengadaan pagar pengaman jalan tersebut "Kalau tidak salah panjangnya itu 2 kilometer lebih," tandasnya. **as**

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 2



Komisi III Janji Kawal Penataan Pasar di Beringkit

MANGUPURA, NusaBali

Komisi III DPRD Badung berjanji bakal mengawal rencana Perusahaan Daerah (PD) Pasar melakukan penataan Pasar Hewan Beringkit dan Pasar Umum Beringkit. Penataan itu perlu karena pada hari-hari tertentu pengunjung pasar membludak sehingga mengakibatkan pedagang dan pembeli tak nyaman.

"Pengunjung pasar, apalagi pada hari pasaran Minggu dan Rabu, penuh sekali. Kalau PD Pasar mewacanakan akan membuat kantong parkir khusus sehingga kendaraan tertata dengan baik, kami mendukung. Karena pada prinsipnya itu *kan* demi kepentingan masyarakat," ucap Ketua Komisi III I Nyoman Satria, Selasa (2/6).

Walaupun demikian, politisi asal Mengwi itu mengharapkan pihak PD Pasar menyampaikan terlebih dahulu kajian teknis atas wacana penataan tersebut. "Misalnya maksud dan tujuannya untuk apa. Lalu seberapa urgen pembangunan kantong parkir diperlukan," kata Satria.

Tidak saja kepada legislatif, yang terpenting wacana ini tersosialisasi secara baik kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat mengetahui secara detail tentang penataan dimaksud. "Intinya semua pihak dimintai pertimbangan dulu," harapnya.

Satria lebih lanjut mengatakan, sekalipun ada rencana penataan ia juga berharap pasar lainnya juga dipikirkan. Mengingat PD Pasar mengelola tidak hanya Pasar Hewan Beringkit maupun Pasar Umum Beringkit. "Menurut kami di Komisi III, pasar tradisional di bawah PD Pasar juga perlu diperhatikan."

Sekian dua pasar ini, PD Pasar juga



SITUASI areal parkir di Pasar Umum Beringkit, Mengwi, Badung.

● NUSABALI/HENDRA

mengelola Pasar Kuta I dan Kuta II, Pasar Nusa Dua, Pasar Kertasari, Pasar Petang, Pasar Sembung, dan Pasar Kapal.

Kemudian, konsep penataan juga harus jelas apakah hanya membangun kantong parkir, atau perlu menambah fasilitas penunjang. Menurut Satria, perencanaan itu harus betul-betul matang. Sehingga pelaksanaan proyek dapat dipertanggungjawabkan.

Diberitakan sebelumnya, Dirut PD Pasar I Made Sutarma menyampaikan, pengunjung Pasar Hewan Beringkit kerap membludak. Sehingga mempengaruhi kenyamanan pedagang

terlebih para pembeli. "Kondisinya yang sekarang belum mendukung. Kalau sudah banyak yang masuk, penuh sekali tempatnya," kata dia.

Sekarang, ini lahan yang ada di sana sekitar 1,25 hektare, dan itu lahan maksimal karena tidak bisa lagi diperlebar, kanan dan kirinya sudah banyak rumah. "Inilah kendala kami," kata Sutarma. "Untuk itu, ke depan kami akan merancang membangun tempat khusus parkir. Modelnya bisa basement atau yang lain. Sekarang konsep itu masih dalam pembahasan," ungkap Sutarma beberapa waktu lalu. **as**

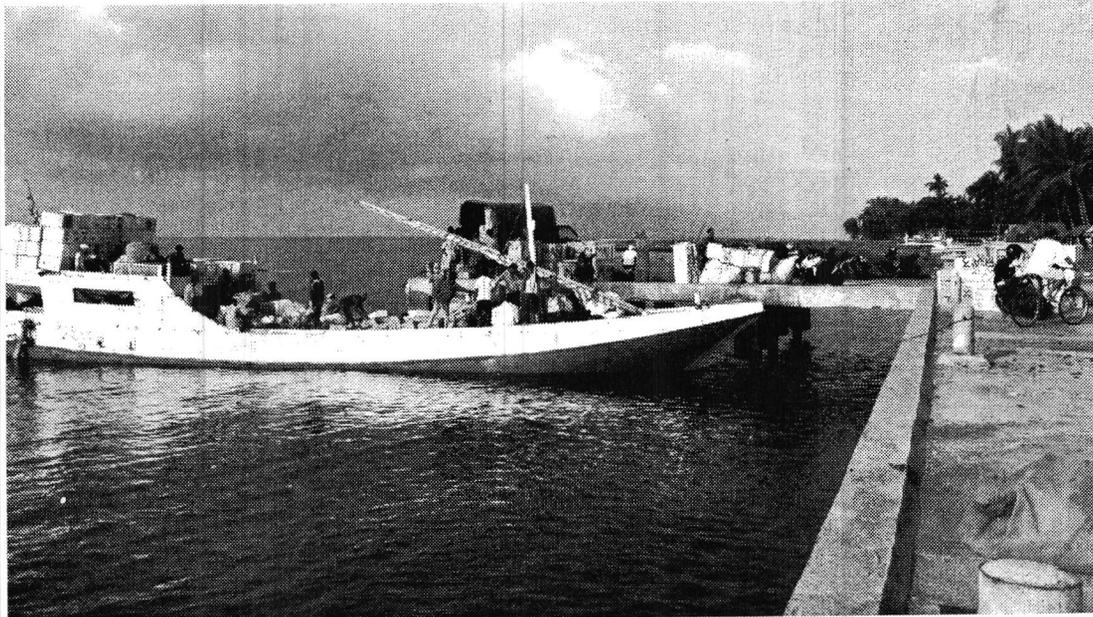
Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 2



Setahun Rusak Dihantam Gelombang

Nasib Dermaga PPI Sangsit Menggantung



DERMAGA PPI Sangsit pasca patah dihantam gelombang, sampai saat ini masih terbengkalai dari rencana pembangunan ulang.

SINGARAJA, NusaBali

Setahun sudah semenjak peristiwa patahnya dermaga Pelabuhan Pangkalan Ikan (PPI) Sangsit, Kabupaten Buleleng, karena dihantam gelombang pasang sampai saat ini masih terbengkalai. Pembangunan dermaga ulang seperti rencana awal, nampaknya belum menemukan titik terang. Meskipun sampai saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai upaya dan juga presentasi langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

"Sampai saat ini kami belum menerima jawaban pasti kapan akan disetujui. Padahal prosedur dari awal sudah dilakukan, mulai dari pembuatan proposal penghapusan aset, sampai dengan presentasi DED ke pusat, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada kepastian," ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Buleleng, Ir Nyoman Sutrisna, Minggu (31/5) kemarin.

Bahkan menurutnya, presentasi Detail Engineering Design (DED) terakhir kalinya dilakukan oleh Wakil Gubernur Bali, Ketut Sukerta, dalam Pramusrenbang di Bapenas, pada 23 April 2015 lalu. Sebelumnya juga, pasca patahnya

PPI Sangsit pada bulan Februari 2014 lalu, yang kini tinggal 23,5 meter dari panjang sebelumnya 60 meter, telah dilakukan dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat.

Saat itu, Pemda Buleleng diintruksikan untuk melakukan penghapusan aset PPI Sangsit, sebelum diajukan pembangunan baru lagi. Hal tersebut pun telah

dilakukan dan dilanjutkan dengan pengajuan proposal pembangunan langsung ke pemerintah pusat.

Dalam DED, rencana pemban-

gunan ulang PPI Sangsit yang butuh anggaran puluhan miliar tersebut, berjalan sangat mulus. Saalah satu anggota DPR-RI dari Bali pun sempat menyatakan dukungannya dengan meminta copian proposal pembangunan dermaga PPI, yang selama ini merupakan dermaga yang sangat penting, untuk bongkar muat ikan dari Bali ke Jawa, bahkan sebaliknya.

Diskanla pun tahun lalu, sempat dipanggil ke Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali untuk melakukan presentasi di depan pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Diskanla pun mengaku sudah bosan melakukan koordinasi dan pendekatan langsung, ke pihak pemerintah pusat, yang sampai saat ini tidak dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan. Meski sampai saat ini dermaga yang masih tersisa masih dapat digunakan, namun kapal-kapal yang berlabuh hanya dapat menurunkan barang dari sisi samping dermaga.

"Kami sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua prosedur dan langkah-langkah sudah kami ikuti dan laksanakan, toh hasilnya masih tetap saja nihil. Ya kami bisa apa selain menunggu," pungkas Sutrisna. **k23**

Edisi : paku, 3 Juni 2015

Hal : 4



Perlu Rp 33 M untuk Blok D RSUD

Pembangunan gedung C RSUD Wangaya segera tuntas. Selanjutnya, direncanakan membangun gedung D yang dipergunakan untuk layanan poliklinik dan rawat inap.

DENPASAR, NusaBali

Pembangunan fisik tahap kedua gedung blok C RSUD Wangaya dipastikan rampung Agustus 2015 ini. Pengadaan alat kesehatan, juga akan segera diusulkan pada APBD Perubahan. Setelah rampung, RSUD Wangaya berencana merenovasi gedung blok D.

Wakil Direktur Administrasi Umum RSUD Wangaya Made Maja

Winaya, Selasa (2/6), mengemukakan, pembangunan fisik gedung C akan rampung Agustus ini. Sedangkan untuk pengadaan alat kesehatan di ruang operasi (lantai III), pihaknya telah mengusulkan dalam APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 20 miliar. Selain itu juga diusulkan untuk penyusunan DED (detail engineering design) gedung D

senilai Rp 1,1 miliar.

"Untuk pembangunan gedung D diperkirakan dananya mencapai Rp 33 miliar," ujarnya. Gedung D, nantinya dipergunakan untuk layanan poliklinik dan rawat inap.

Rencana renovasi gedung D itu mendapat dukungan kalangan anggota DPRD Kota Denpasar. Selain pengadaan alat kesehatan untuk gedung C, anggota dewan mendorong agar pembangunan gedung D dilanjutkan. "Setelah pembangunan fisik gedung C rampung, memang harus dialokasikan dana untuk pengadaan alkes, sehingga segera bisa beroperasi. Karena itu, kami mendorong agar dalam APBD Perubahan nanti, Pemkot Denpasar

mengalokasikan dana untuk pengadaan alat kesehatan. Jika nanti pembangunan gedung rampung, alat kesehatannya belum ada, malah akan mubazir," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar Eko Supriadi, kemarin.

Selain itu, dengan terus meningkatnya jumlah pasien terutama yang menggunakan jaminan kesehatan, maka RSUD Wangaya masih perlu tambahan ruang rawat inap. "Kami sangat mendorong agar gedung D RSUD Wangaya direnovasi," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III AA Susruta Ngurah Putra. Dikatakan, berdasarkan hasil kunjungan ke RSUD Wangaya, proses pembangunan gedung C tahap kedua sudah

berjalan sesuai rencana. Bahkan, sebagian ruangan sudah difungsikan. Sedangkan untuk lantai paling atas masih dalam proses penyelesaian. "Setelah gedung C rampung, kami meminta agar Pemkot Denpasar mengalokasikan dana untuk pembangunan gedung D," ucapnya.

Sebagai informasi, gedung blok C dengan empat lantai termasuk basement terdiri dari lobi, ruang rawat inap kelas III, ruang tindakan, serta di lantai tiga untuk ruang operasi. Ruang rawat inap disediakan sebanyak 5 ruangan dengan kapasitas masing-masing 8 bed, sehingga total bisa menampung 40 pasien kelas III. Gedung blok C juga dilengkapi dengan ruang PICU, NICU, dan ICCU. n

Edisi : Rabu 3 Juni 2015

Hal : 3



Satpol PP Segel Dua Menara

Pembangunan dua menara itu melanggar Perda Nomor 1 tahun 2013, serta Perbup Nomor 33 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara.

NEGARA, NusaBali

Satpol PP Jembrana menyegel dua proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) milik salah satu seluler di dua lokasi berbeda di Jembrana, Senin (1/6). Selain melakukan penyegelan, petugas juga menyita genset di proyek menara Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara.

Satpol PP mengawali mendatangi pembangunan menara di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara. Tim mendapati pembangunan pondasi, sementara di sebelah bangunan itu menemukan menara yang telah beroperasi. Satpol PP memutuskan menyegel menara itu dengan memasang Pol PP Li-

ne, termasuk mematikan arus listriknya.

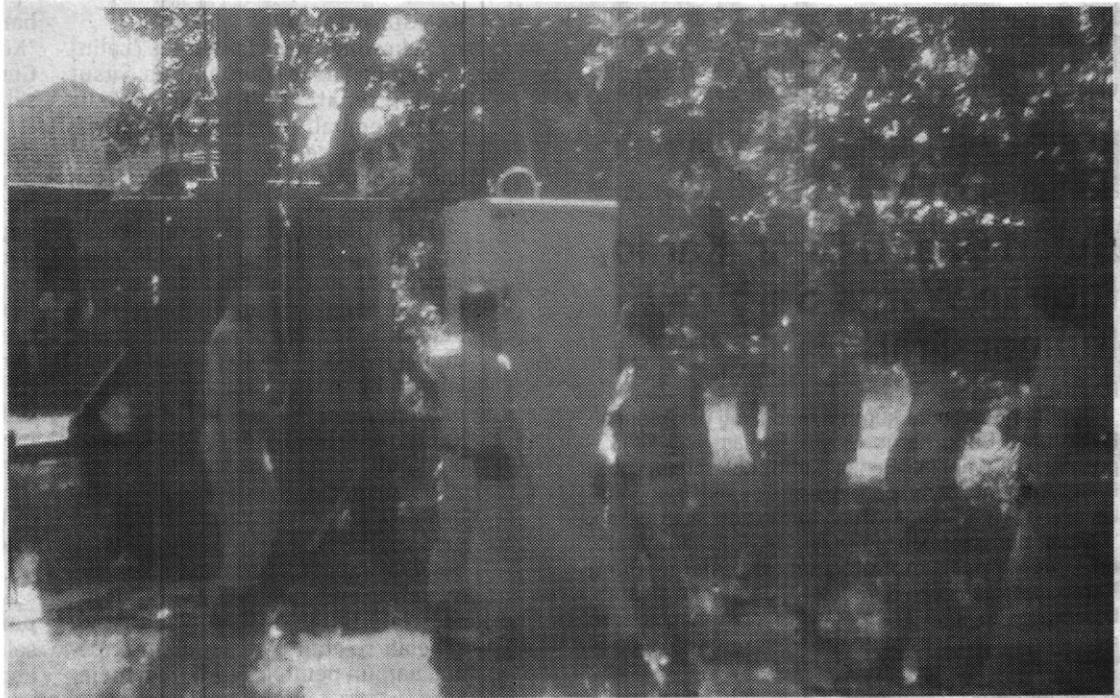
Sidak kedua dilanjutkan dengan mengecek proses pembangunan menara di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, yang belum berizin. Di lokasi kedua itu, ditemukan sebuah menara mobile (berisi roda, bisa dipindah-pindah, red), namun belum beroperasi. Mengingat pembangunan tersebut belum berizin, Satpol PP menyita genset untuk dibawa ke kantor serta mengambil sejumlah peralatan kerja agar proyek tersebut dihentikan.

Kasi Trantib dan Tranmas Satpol PP Jembrana, I Gede Nyoman Suda Asmara, membenarkan adanya pemberhentian sementara aktivitas pembangunan menara di dua lokasi tersebut. Menurutnya, di dua lokasi itu ada juga menara mobile seluler yang sudah disiapkan. "Kita cek, ternyata salah satu menaranya juga sudah beroperasi. Sedangkan yang satu belum, tapi kita sita peralatannya," ujarnya, Selasa (2/6).

Saat mendatangi lokasi kedua menara itu, petugas tak menemukan penanggungjawabnya. Di lokasi hanya menemui para buruh yang mengaku tidak tahu



Sambungan - - -



• NUSABALI/IB DIWANGKARA
SALAH satu menara mobile di samping lokasi pembangunan menara permanen di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, yang disegel Sat Pol PP Jembrana, Senin (1/6).

mengenai perizinan. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Hub-kominfo dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Jembrana, dipastikan kedua menara itu belum ada izin. Sehingga melanggar Perda Nomor 1 tahun 2013, serta Perbup Nomor 33 tahun 2013, tentang penyelenggaraan menara. "Tadi kita sudah minta sama pekerja di sana, dan lewat Kepala Lingkungan juga agar menyampaikan kepada penanggungjawabnya datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Yang jelas sebelum ada izin, jangan dilanjutkan dulu," tandasnya. **od**

Edisi	: <u>Rabu, 3 Juni 2015</u>
Hal	: <u>7</u>



Sebulan 5.998 Wisatawan Kunjungi City Tour

★ Disparda Denpasar Rancang Shuttle Bus

DENPASAR, NusaBali

Sejak diluncurkan akhir Maret lalu, program Heritage City Tour kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di Kota Denpasar, seperti Museum Bali, Pura Jagatnatha, dan Pasar Badung.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar, sepanjang April 2015 tercatat sebanyak 5.998 wisatawan yang berkunjung ke tiga objek tersebut. "Museum Bali masih menjadi objek favorit bagi wisatawan," ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Drs I Wayan Gunawan, Selasa (2/6). Tercatat, selama April 2015 sebanyak 3.244 wisatawan yang berkunjung ke Museum Bali. Disusul Pasar Badung sebanyak 1.591 wisatawan dan Pasar Seni Kumbasari tercatat 1.163 wisatawan.

Gunawan menjelaskan, kunjungan wisatawan ke Kota Den-

pasar memang fluktuatif. Terlebih kini merupakan bulan-bulan sepi (low season). Namun dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah kunjungan wisatawan, baik manca negara maupun domestik mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada Maret 2014 jumlah kunjungan hanya 5.444 orang, maka pada Maret 2015 ini naik menjadi 8.036 orang. Kondisi serupa juga terjadi pada bulan April. Pada April 2014 jumlah kunjungan hanya 3.999 orang, maka pada tahun ini meningkat menjadi 5.998 orang.

Terkait usulan Dewan Denpasar agar city tour dilengkapi dengan shuttle bus sebagai ciri khas wisata kota, Gunawan mengatakan, pihaknya sudah merancang pengadaan transportasi tersebut. Saat ini pihaknya sudah mengusulkan agar pada APBD Perubahan bisa dialokasikan dana untuk peren-

canaan desain transportasi city tour. "Masalah transportasi sudah kami rancang. Tahap awal mengusulkan dana untuk perencanaan desain," ujarnya.

Tentang penyiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung heritage city tour, Gunawan mengatakan, berbagai pembinaan dan penyuluhan akan terus dilakukan. Terutama pembinaan terhadap para pemandu wisata yang ada di masing-masing objek, seperti di Museum Bali, Pura Jagatnatha, Pasar Badung, dan Pasar Kumbasari. Termasuk di beberapa objek yang baru dikembangkan seperti Pura Maospait dan Puri Jro Kuta.

"Di samping penyuluhan kepada guide lokal, juga telah dilaksanakan penyuluhan tentang Sapta Pesona dengan menasar siswa sekolah setingkat SMA/SMK se-Kota Denpasar," ujarnya. **GN**

Edisi : Rabu, 3 Juni 2015

Hal : 3